

Krisis pangan di depan mata

Harga pangan dunia menyentuh angka tertinggi pada Februari 2011, setelah naik berturut-turut dalam 8 bulan terakhir. Pada indeks harga pangan dunia versi Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia/FAO, harga 55 komoditas—kecuali gula—mengalami peningkatan.

Kenaikan harga pada Februari mencapai 2,2% dibandingkan dengan Januari, tertinggi sejak FAO mulai mendata pergerakan harga pangan dunia 20 tahun lalu. Menurut organisasi tersebut, perubahan harga terjadi karena penurunan pasok bahan pangan, terutama gandum dan biji-bijian. Faktor lain yang berpengaruh adalah gejolak harga minyak, cuaca ekstrem, dan kebijakan pertanian per negara.

FAO, yang merupakan bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, memencamkan dampak kenaikan harga pangan terhadap stabilitas sosial dan politik di beberapa kawasan dunia yang rawan konflik, seperti Afrika Utara dan Timur Tengah. Menyusul runtuhnya rezim Presiden Hosni Mubarak di Mesir, pergolakan berdarah pecah di Libya, negara kaya minyak di Afrika Utara. Kita belum tahu bagaimana akhir perkembangan ini karena Moammar Khadafi, yang telah memimpin Libya selama 40 tahun, bergeming dari tuntutan agar mundur.

Gerakan antipemerintah atau antimonarki dapat meluas ke beberapa negara Timur Tengah, dan bukan tak mungkin hal itu menimpa Arab Saudi. Sebagai pengeksportor minyak paling berpengaruh, kerusuhan di Arab Saudi diperkirakan berdampak luas.

Situasi internasional yang tak menentu ini berpotensi membuat harga-harga barang kebutuhan pokok naik, ancaman inflasi meningkat, dan daya beli masyarakat terpuruk. Dampak langsungnya adalah jumlah orang miskin bertambah. Data Bank Dunia memperlihatkan kenaikan harga pangan telah mendorong sekitar 44 juta orang di negara berkembang jatuh ke dalam lembah kemiskinan dalam 9 bulan terakhir.

Tak terkecuali, di negara-negara berkembang yang tergolong *emerging market* seperti Indonesia, masalah kemiskinan masih menjadi momok bagi pemerintah. Pertumbuhan ekonomi yang kuat dan stabil memang berperan penting karena setidaknya menciptakan lapangan kerja, namun pembangunan pabrik-pabrik sering kali membuat warga masyarakat terasing dari akarnya di desa.

Masalah kenaikan harga pangan belakangan ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah di negara-negara berkembang untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk impor dan menggenjot sektor pertanian di dalam negeri, terutama sentra-sentra produksi daerah. Caranya, antara lain dengan menghentikan invasi manufaktur ke lahan-lahan pertanian dan memberikan insentif kepada investor agar mau masuk ke sektor pangan.

Ada baiknya mencontoh Jepang, negara industri maju yang fokus membangun sektor pertanian dan melindunginya secara total dari serbuan produk asing. Negeri itu menunjukkan bahwa pembangunan industri dapat terlaksana secara gemilang tanpa perlu mengorbankan sektor pertanian.

Dari puncak

Securities and Exchange Commission (SEC) menetakpan Rajat Gupta, eksekutif senior McKinsey & Company dan bekas direktur Goldman Sachs, sebagai terdakwa kasus *insider trading* kepada Raj Rajaratnam, pendiri *hedge fund* Galleon Group, yang akan diadili pekan ini.

Seperti diketahui, pada September 2008, Berkshire Hathaway's berencana melakukan investasi US\$5 miliar melalui Goldman. Terkait rencana itu, menurut dokumen SEC, "Gupta dan Rajaratnam terlibat pembicaraan telepon." Tak lama setelah itu, Galleon memborong lebih dari 80.000 lembar saham Goldman.

Pagi berikutnya, masih menurut dokumen SEC, dua nama itu kembali bertelepon dan beberapa menit setelah itu, Galleon kembali membeli lebih dari 40.000 saham Goldman. Kegiatan itu, menurut dakwaan SEC, menghasilkan keuntungan lebih dari US\$17 juta.

Jika tuduhan SEC ini benar, kasus Gupta dan Rajaratnam akan menjadi bukti kesekian bahwa *insider trading* adalah kejahatan puncak dunia finansial.

• *International Herald Tribune*, 3 Maret

Minyak & krisis Timur Tengah

Harga minyak mentah kembali meroket dan tembus US\$100 per barel. Ini memicu gelombang protes aksi prodemokrasi di sejumlah negara Timur Tengah, yang mengakibatkan ketidakstabilan politik dan penurunan produksi serta gangguan pasokan.

Harga minyak pernah tembus US\$147 di pasar AS pada 2008. Dan terkait krisis Timteng, sejumlah laporan menyebutkan kemungkinan harga minyak tembus US\$200 apabila krisis di Timteng memicu ketidakstabilan kawasan.

Badan Energi Internasional mengingatkan jika harga minyak bertengger di level US\$100 per barel sepanjang tahun ini, dampak negatifnya terhadap perekonomian dunia akan sama seriusnya dengan krisis minyak pada 1973 atau krisis ekonomi global 2008.

Kenaikan harga minyak akhir-akhir ini telah membawa dampak negatif terhadap perekonomian Jepang.

• *The Asahi Shimbun*, 3 Maret

Menyoal rencana eksplorasi baru Lapindo

Kasus semburan lumpur harus jadi pembelajaran

OLEH FIRDAUS CAHYADI
Knowledge Manager for Sustainable Development, OneWorld-Indonesia

Berita mengejutkan itu datang dari Sidoarjo. Salah satu media massa di Jakarta edisi 26 Februari, menuliskan bahwa Lapindo akan menambah titik eksplorasi di Desa Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, yang hanya berjarak beberapa kilometer dari pusat semburan lumpur.

Baru kemarin rasanya semburan lumpur Lapindo menghancurkan kehidupan warga Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Semburan lumpur itu masih menyisakan duka yang amat dalam bagi warga setempat. Rumah, tanah dan juga harapan warga Porong untuk hidup seperti warga lainnya seakan hilang begitu muncul semburan lumpur Lapindo.

Pada saat air mata masih basah, pada saat luka masih menagena itu, Lapindo memiliki rencana kembali melakukan eksplorasi minyak dan gas bumi (migas) di wilayah itu. Dari sisi ekonomi mungkin eksplorasi itu layak, karena Provinsi Jawa Timur memang terkenal sebagai penopang migas secara nasional.

Menurut catatan Walhi Jawa Timur, provinsi ini menopang 40% kekayaan migas nasional dengan 28 blok migas dalam tahap eksplorasi. Salah satunya adalah Blok Brantas, yang memiliki 49 sumur yang tersebar di

tiga kabupaten (Sidoarjo 43 sumur, empat sumur di Mojokerto dan dua sumur di Pasuruan).

Pertanyaannya kemudian adalah, meskipun secara ekonomi layak, namun apakah secara sosial, rencana Lapindo untuk kembali melakukan pengeboran eksplorasi itu juga layak? Mengapa Lapindo seperti mengabaikan kejadian semburan lumpur yang terjadi pada 2006 silam?

Keberanian Lapindo untuk kembali merencanakan eksplorasi pengeboran baru di Sidoarjo setidaknya didasarkan beberapa alasan, antara lain pemerintah sudah begitu meyakini bahwa semburan lumpur Lapindo adalah bencana alam dan tidak terkait pengeboran.

Keyakinan pemerintah itu kemudian mendapat angin segar setelah ditolaknya gugatan perdata Walhi dan YLBHI. Keyakinan itu semakin tak tergoyahkan ketika Polda Jawa Timur menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus pidana Lapindo.

Keyakinan itu seakan mengabaikan dokumen rahasia Medco, mitra Lapindo dalam mengeksplorasi migas di Blok Brantas, yang menyatakan bahwa semburan lumpur di Sidoarjo terkait dengan aktivitas pengeboran. Bahkan laporan audit BPK dan pendapat mayoritas pakar pengeboran internasional yang menyatakan hal yang sama pun diabaikan oleh pemerintah.

Kuatnya keyakinan pemerintah bahwa semburan lumpur Lapindo adalah bencana alam dan tidak terkait dengan pengeboran juga tecermin dari munculnya wacana dari pemerintah untuk menjadikan kawasan semburan lumpur sebagai tempat wisata geologi.

Pesan dari munculnya wacana itu sangat jelas. Bahwa semburan lumpur Lapindo justru membawa berkah bagi masyarakat sekitar.



BISNIS/LHAM NESABANA

Kawasan yang terkena semburan dapat menjadi tempat wisata. Dan itu artinya akan mendatangkan uang. Jadi tidak perlu ada yang ditakutkan lagi jika ada eksplorasi migas lanjutan di kawasan itu. Kalaupun nanti terjadi kecelakaan pengeboran, *toh* akan tetap bisa membawa berkah bagi masyarakat sekitar.

Pembelokan

Kuatnya keyakinan pemerintah bahwa semburan lumpur Lapindo adalah bencana alam juga terlihat dari pola penanganan dampak dari semburan lumpur itu. Dalam penanganan dampak

semburan lumpur, persoalan ganti rugi telah dibelokkan menjadi sekadar persoalan jual beli aset. Apa ini artinya?

Artinya, jika persoalan jual beli aset itu selesai, selesai pulalah kasus Lapindo ini. Dan karena sudah selesai kasusnya, tidak ada alasan lagi untuk mempermasalahakan eksplorasi migas baru di kawasan itu.

Namun, sesederhana ituukah sebenarnya kasus Lapindo ini? Ternyata tidak. Persoalan semburan lumpur Lapindo bukan hanya persoalan jual beli aset korban lumpur. Karena semburan lumpur tidak hanya ber-

dampak pada tenggelamnya aset warga berupa tanah dan rumah tetapi juga menyangkut hilangnya hak-hak warga lainnya.

Semburan lumpur Lapindo juga berdampak pada munculnya semburan gas metan yang muncul secara liar dan mudah terbakar di rumah-rumah penduduk, penurunan tanah di kawasan yang membahayakan konstruksi rumah, polusi udara dan air.

Selain berdampak buruk secara ekologi dan kesehatan, lumpur Lapindo juga berdampak buruk secara sosial bagi warga Porong. Dampak buruk itu salah satunya menimpa anak-anak. Kini sebagian dari mereka terpaksa harus putus sekolah.

Singkat kata persoalan Lapindo bukan hanya persoalan jual beli aset. Andaikan persoalan jual beli aset ini selesai, tidak otomatis kasus ini selesai. Masih ada persoalan hak-hak korban lumpur yang harus segera dipulihkan.

Bahkan jika mau ditelisik lebih dalam, kasus Lapindo bukan hanya sekadar persoalan semburan lumpur. Ada persoalan perizinan pertambangan di kawasan padat huni. Ketentuan Badan Standar Nasional Indonesia tentang operasi

pengeboran darat dan lepas pantai di Indonesia misalnya, menyebabkan bahwa sumur pengeboran migas harus dialokasikan sekurang-kurangnya 100 meter dari jalan umum, rel kereta api, pekerjaan umum, perumahan, atau tempat lain yang berpotensi menimbulkan sumber nyala api.

Bagaimana dengan eksplorasi pengeboran dalam kasus Lapindo? Sumur Banjar Panji-1 hanya berada 5 meter dari wilayah permukiman, 37 meter dari sarana publik, dan kurang dari 100 meter dari pipa gas Pertamina.

Oleh karena itu, pemerintah harus menolak rencana baru pengeboran eksplorasi Lapindo di Sidoarjo. Keselamatan warga Sidoarjo harus lebih diutamakan. Semburan lumpur Lapindo yang hingga kini belum bisa dihentikan harus menjadi bahan pembelajaran bagi pemerintah.

“VERBATIM”



“Bukan isu utama.”

Parman Nataatmadja, Dirut PNM, soal suku bunga pinjaman di kalangan UMKM.



“SBY dalam comfort zone.”

Yudi Latief, pengamat politik, soal kemungkinan SBY membentuk koalisi lebih gemuk.

Surat-surat harus dilengkapi dengan identitas pribadi

Pengebirian fungsi pengawasan DPR

Sewaktu duduk di sekolah dasar dan sekolah lanjutan dalam pelajaran seperti PMP, kewarganegaraan dan pelajaran ilmu pengetahuan sosial sejenis, kita diajarkan tentang apa dan bagaimana tugas, fungsi dan kewajiban lembaga-lembaga negara Republik Indonesia.

Kita ketahui bahwa DPR salah satu tugas utamanya adalah mengawasi kinerja presiden atau pemerintah. Pemerintah di pimpin oleh presiden diawasi DPR dalam setiap kebijakan dalam menjalankan roda kepemimpinan eksekutif. Oleh karena itu, koalisi antara kedua lembaga itu (pemerintah dan DPR) yang dapat ‘mengebir’ tugas dan fungsi serta peran pengawasan DPR adalah ‘haram’ hukumnya karena dapat merusak tatanan sistem kekuasaan negara yang telah diatur oleh para pendiri bangsa ini.

Sekarang ini tampak tatanan tersebut menjadi karut-marut dan tidak jelas lagi fungsi masing-masing akibat adanya suatu istilah koalisi sejak SBY memimpin negara ini.

Dengan adanya istilah koalisi dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II tampak sekali ‘syahwat’ politik pemerintah yang getol menyuarakan koalisi antarpantai di DPR yang pada gilirannya malah terjadi koalisi antara pemerintah (presiden) dengan DPR. Dua lembaga negara yang sebenarnya memiliki tugas dan fungsi tidak sama bahkan seharusnya bertolak belakang. Namun, melalui koalisi ini kita melihat seakan tidak ada bedanya lagi ruang lingkup pekerjaan kedua lembaga itu. Koalisi membuat anggota DPR harus mengikuti kemauan presiden (baca: peme-

rintah).
Nah, kalau begitu apa bedanya KIB jilid II ini dengan era Orde Baru dulu ketika sang penguasa memaksakan segala sesuatunya seragam, seiya sekata dan harus satu suara dengan penguasa? Etika politik macam apa ini? Aneh tapi nyata? Apakah bentuk koalisi seperti ini tidak melanggar atau menyalahi UU, bahkan UUD ‘45? Tolong para ahli hukum ketatanegaraan dan pakar sosial politik untuk angkat bicara termasuk para aktivis pengawal reformasi yang berdarah-darah agar segera mengambil sikap atas skenario pemerintah yang sangat tendensius.

Aries Musnandar
PPs UIN Maliki, Malang

Soal perda baru dan toleransi

Kekeerasan yang terjadi baru-baru ini terhadap kelompok minoritas serta peraturan-peraturan daerah yang baru ditetapkan, yang membuat kebebasan beragama saat ini, merusak reputasi internasional Indonesia sebagai negara demokrasi dengan tradisi toleransi dan komitmen perlindungan kebebasan bagi semua warga negaranya.

Sebagai sahabat dan sebagai rekan Indonesia di G-20 dan organisasi internasional lainnya, kami (Amerika Serikat) mendukung mayoritas rakyat Indonesia yang tidak menyukai kekeerasan berlatar agama dan mendukung toleransi. Hukum harus melindungi warga negara dari kekeerasan, alih-alih membatasi hak mereka.

Kedubes AS
Jakarta

PEMBACA MENULIS

Rasa kebangsaan mulai luntur

Ketika zaman sudah berganti, pelan tapi pasti nilai-nilai kebangsaan kita secara perlahan mulai memudar pula. Lunturnya nilai-nilai kebangsaan pada generasi saat ini disebabkan oleh banyak faktor kehidupan yang cenderung kontraproduktif dan tidak mendidik. Salah satu di antaranya yang menjadi momok dan sangat memprihatinkan kita adalah masalah peredaran dan pemakaian narkoba di kalangan generasi muda.

Di sisi lain perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, transparan dan vulgar melalui tayangan-tayangan di televisi seperti sinetron, film dan *reality show* yang awalnya hanya bertujuan sebagai hiburan yang mendidik, kini justru berakibat negatif terhadap moral para generasi muda dan tentunya sudah pasti akan melunturkan nilai-nilai rasa kebangsaan. Tawuran antarpelajar, premanisme, demo anarkis dan merebaknya geng motor dari kalangan muda mengindikasikan lunturnya rasa kebangsaan di kalangan para pemuda, dan ini dapat menjadi ancaman stabilitas keamanan nasional.

Namun, ketika sebagian generasi muda lebih suka dengan gaya konyol, merusak dan tidak mendidik, kita masih bisa merasa bangga dengan prestasi siswa-siswa Indonesia yang meraih prestasi puncak/terbaik dengan meraih medali emas dan perak pada olimpiade sains, lomba penelitian ilmiah, maupun lomba matematika internasional beberapa bulan lalu.

Iman Suseandri
Kedung Badak Bogor

Kritik, saran, dan komentar bisa disampaikan melalui surat ke redaksi *Bisnis Indonesia* atau e-mail: redaksi@bisnis.co.id

Bisnis Indonesia

Tim Pengembangan Redaksi: Adhitya Noviard, Y. Bayu Widagdo. **Manajer Sekretariat Redaksi:** Indah Sutrinigrum. **Asisten Redaktur:** Algoth Putranto, Andy T. Kurniady, Aprika Rani Handiana, Arif Pitoyo, Bambang Supriyanto, Bastulan Siregar, Elsy Refianti, Erna Sari Ulina Girsang, Fahmi Achmad, Gajah Kusumo, Hendra Budiawan, Junaidi Halki, Lutfi Zaenudin, Moh. Fatkhul Maskur, Muhammad Munir Haikal, Nana Oktavia Musliana, Rahyuningstih, Sylviana Pravit R.K.N., Taufik Wisastra, Tommy Sasangka, Tri Dirgantara Pamenan, Yayan Indrayana, Yeni H. Simanjuntak, Yusran Yunus. **Staf Redaksi:** Achmad Adis, Afriyanto, Agus Supriadi, Anggi Otkarinda, Anugerah Perkasia, Arif Gunawan Sulistiyono, Arif Novianto Yuwono, Asep Dadan Muhanda, Bambang P. Jatmiko, Berliana Elisabeth, Dewi Astuti, Dienna Lestari, Elvani Harifaningstih, Erwin Tambunan, Fajar Sidik, Fita Indah Maulana, Gita Arwana Cakti, Hendri T. Asworo, Herry Suhendra, Hilda Sabri Sulistyono, Irsad, Irvin Avriano, John A. Oktaveri, Linda Teti Silitonga, Maria Yuliana B., Mia Chitra Dinisari, M. Tahir Saleh, Mulia Ginting Munthe, Natalina Kasih Wasiyati, Nurbaeti, Nurudin Abdillah, Rahmayulis Saleh, Ratna Ariyanti, Raydin, Rini Effita Hendry, R. Fitriana, Roni Yuniyanto, Rudi Arifianto, Sepudin, Siti Nuraisyah Dewi, Stefanus Arief Setiaji, Theresia Diyah Wulandari, Tularji, Yusuf Waluyo Jati. **Perwakilan Bali:** Samantha Ardiansyah (Koordinator Bali). **Bandung:** Asep Mh. Mulyana (Manajer), Hilman Hidayat (Asisten Redaktur), Muhammad Sufyan. **Makassar:** M. Noor Korompt (Manajer), Kwan Men Yon (Asisten Redaktur), Siti Munawaroh (Koordinator Balikpapan). **Medan:** Melvin A. Sebayang (Manajer), Master Sihotang, Semarang: Edy Barlianto (Manajer), Endot Brilliantono, Rahmat Sujianto. **Surabaya:** Galih Prakoso (Manajer), Marlina A. Jobs (Asisten Redaktur), Bambang Sutegoro (Koordinator Malang), Dwi Wahyuni, Wahyu Darmawan. **Batam & Pekanbaru:** Suyono Saputra (Manajer). **Foto:** Dedi Gunawan, Endang Mughtar, Kelik Taryono, Yayus Yuswoprihanto. **Artistik:** Adi Purdiyanto, Tutun Purnama.

Manajer Produk: Andi Trisuda. **Manajer Media Digital:** Deriz Syahpatria Syarif. **Penerbit:** PT Jurnalingdo Aksara Grafika. **Direksi:** Lulu Terianto (Direktur Utama), Ahmad Djauhar, Endy Subiantoro, **Alamat Kantor:** Wisma Bisnis Indonesia, Lt. 5-8, Jl. KH Mas Mansyur No. 12A, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220. **Telepon:** (021) 57901023 (hunting). **Faks:** redaksi: (021) 57901025, **Pemasaran:** (021) 57901024, **Perusahaan:** (021) 57901028. **Rekening bank:** PT Jurnalingdo Aksara Grafika, BCA cab. Wisma Asia 084-303.757-4; PT Jurnalingdo Aksara Grafika, Bank Mandiri cab. Wisma Bisnis Indonesia 121-009.009999-9; PT Jurnalingdo Aksara Grafika, Bank BNI (S) cab. Kramat 10528868. **Kantor Perwakilan:** Jawa Timur, Jl. Opak No. 01 Surabaya. **Telp.** (031) 5670748, **Fax.** (031) 5675853. **Malang:** Pertokoan Sarangan, Jl. Sarangan No. 1a Malang. **Telp.** (0341) 402727, (0341) 480630, **Fax.** (0341) 402728. **Denpasar:** Jl. Suli No. 119 Blok B-3 Denpasar 80233. **Telp.** 0361-7446604, **Fax.** (0361) 261067. **Jawa Tengah:** Jl. Sompok Baru No. 79 Semarang. **Telp.** (024) 8442852, **Fax.** (024) 8454527. **Jawa Barat:** Jl. Buah Batu No. 466, Bandung 40261. **Telp.** (022) 7321627, 7321637, 7321698, **Fax.** (022) 7321680. **Sumatra Utara:** Kompleks Istana Bisnis Center, Medan Malimul Ji. Brigjend. Katamsu No. 6, Medan, **Telp.** (061) 4554121/4553035 **Fax:** (061) 4553042. **Riau:** Jl. Pepaya No. 42, P. Karam Sukajadi, Pekanbaru 28127. **Telp.** (0761) 7048307, **Fax.** (0761) 40335. **Batam:** Kompleks Ruko Mahkota Bayu Blok C No.8 Batam Centre - Batam **Telp.** (0778) 748 3156 / **Fax.** (0778) 748 3154, **Indonesia Timur:** Jl. Metro Tanjung Bunga Mali GTC Makassar GA-9 No. 16, **Telp.** (0411) 814203 **Fax:** (0411) 8114253. **Bali:** Kompleks Balikpapan Superblok, Jl. Jend. Sudirman Stal Kuda Blok A/18, Balikpapan **Telp.** (0542) 7213507, **Fax:** (0542) 7213508. **Harga langganan:** P. Jawa Rp117.000/bulan, luar Jawa Rp117.000/bulan. **Tarif iklan:** Display Rp35.000/mm kolom, berwarna Rp52.000/mm kolom, iklan laporan keuangan Rp21.000/mm kolom, berwarna Rp34.000/mm kolom, berwarna Rp31.000/minium/3 baris. **ISSN** 0215-2045. **Surat izin:** SK Menpen No; 017/SK/Menpen/SIUPPA/A/7/1985, 4 Desember 1985, **Anggota SPS** No. 116/1985/11/A/2002, **terbit** 7 kali seminggu.